

Jiwa Persatuan Dan Kesatuan Dalam Prespektif Budaya Masyarakat Yang Pluralistik

Oleh: Saptono Dosen PS Seni Karawitan

!.Pengantar

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakekatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah; suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Sebagai dasar filsafat negara Indonesia, maka Pancasila sebagai satu asas kerokhanian dan dasar filsafat negara. Maka Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sebagai Pemersatu bangsa dan negara Indonesia maka sudah semestinya bahwa Pancasila dalam dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan. Dalam masalah ini Pancasila mengandung *persatuan* dan *kesatuan* yang kokoh, sehingga merupakan satu sistem filsafat tersendiri diantara sistem-sistem filsafat lainnya di dunia ini (Kaelan, 1991:45). Pancasila sebagai kebudayaan Nasional memiliki lima nilai hakiki seperti; nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bandem, 1995)

Dalam suatu masyarakat bangsa yang pluralistik atau multikultural merupakan suatu keharusan dalam menjaga keutuhan negara-bangsa (*nation state*) Indonesia. Secara konstitusional, kita memiliki landasan yang kuat bagi integrasi nasional. Ideologi nasional Pancasila yang diterima oleh kekuatan *sos-pol* sebagai asas tunggal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan "*weitenchaung*" persatuan (Atmadja, 2002:52). Hasrat yang kuat akan kebersamaan kini memerlukan perawatan yang seksama, guna mengimbangi kecenderungan sentrifugal baik yang datang dari diri bangsa (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal) dengan terpaan arus global. Tantangan kultural masa depan dalam konteks ini dikaitkan dengan krisis radikal modernitas; dilema antar melestarikan tradisi atau memburu lahan *kultural* baru.

Budaya dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya dibentuk oleh masyarakat atau tidak ada budaya tanpa masyarakat demikian juga sebaliknya masyarakat merupakan pendukung dari kebudayaan sehingga tidak ada masyarakat tanpa budaya. Sehingga hubungan antara budaya dan masyarakat adalah hubungan yang bersifat timbal-balik; kebudayaan membentuk manusia, tetapi manusia juga membentuk kebudayaan.

Konsepsi kebudayaan yang diuraikan dalam pasal 32 mengenai kebudayaan Nasional dan kebudayaan Daerah-daerah di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini, menitik beratkan pada usaha budi manusia, dengan sifat memajukan, mempersatukan, dan mempertinggi derajat manusia. Ada tiga wawasan pokok yang menjadi *jiwa* dari pasal 32 itu, yakni; *wawasan kemanusiaan*, *wawasan kemajuan*, dan *wawasan kebangsaan*.

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini adalah didukung oleh adanya Kebudayaan Nasional Indonesia. Penampilan dari berbagai manifestasi budaya seperti budaya Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Bali, Lombok, dan sebagainya. Hal tersebut sering menaungi munculnya kebudayaan baru, dan sangat berarti bagi penduduk Indonesia yang makin besar ini.

Oleh karena itu keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan yang saling bertentangan, namun perbedaan itu justru merupakan daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesa dan resultan, sehingga seluruh keanekaragaman itu terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa (Kaelan, 1991:124).

Kebudayaan Bali adalah perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai manusia, serta diarahkan untuk memberi wawasan dan makna dalam segenap bidang kehidupan. Manusia sebagai bagian dari masyarakat dan pendukung dari kebudayaan bersifat dinamis. Manusia akan selalu melakukan perubahan sebagai respon terhadap lingkungan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi didalam kehidupannya. Kebudayaan itu secara oprasional adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang meliputi tiga wujud dan tujuh pokok kebudayaan. Koentjaraningrat (1974) didalam membedakan tiga wujud atau tingkat; yaitu kebudayaan sebagai dunia ide-ide atau wujud budaya, kebudayaan sebagai aktivitas atau wujud sosial, dan kebudayaan sebagai artefak (benda hasil budaya) atau wujud fisik. Sedangkan tujuh unsur pokok kebudayaan terdiri dari; sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem agama (Bandem, 1995).

Kebudayaan Bali umumnya menerima unsur-unsur asing untuk menjadi milik dan memeperkaya kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian. Potensi ini menjadi amat penting dalam menghadapi globalisasi kebudayaan. Sebagai suatu sistem kebudayaan, Bali memiliki kekayaan variasi dan dieversifikasi sesuai dengan adagium *desa, kala, dan patra* (tempat, waktu, dan kondisi). Keberadaan seperti ini menggambarkan satu kondisi Bhineka Tunggal Ika dalam kebudayaan. Dalam menghadapi kontak-kontak budaya Bali dengan budaya lain, nilai ini menjadi faktor ketahanan budaya.

Dari gambaran keanekaragaman di atas, selanjutnya bagaimana dengan daerah Propinsi Bali yang merupakan pintu gerbang utama pariwisata bagi Indonesia, bahkan sudah sejak awal abad ke-20 Bali telah menjadi perhatian pelancong mancanegara. Secara strategis daerah Propinsi Bali merupakan tempat lalu lintas dari segala penjuru dunia, maka kontak atau hubungan dengan bangsa dan budaya asing sulit dihindari. Terlebih dengan diera globalisasi saat ini diantara negara-negara tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, maka unsur-unsur budaya asing disengaja atau tidak disengaja akan mempengaruhi budaya Bali.

Daerah Bali memiliki keunikan dan keunggulan kebudayaan. Perpaduan harmonis antara potensi kebudayaan dan sumber daya manusia yang kreatif dengan didukung alam yang mempesona merupakan modal dasar untuk menopang keunggulan yang kompetitif daerah Bali sebagai daerah tujuan wisata. Sebagai konsekuensi daerah tujuan wisata; wisatawan manca negara dan domestik, maka mobilitas penduduk (migrasi) akan selalu terjadi di Bali. Fakta yang ada menunjukkan jumlah “kaum pendatang”, khususnya etnis Nusantara cukup besar di Bali. Hal ini paling tidak dilegitimasi oleh jumlah paguyuban etnis Nusantara yang ada di Bali kurang lebih dengan jumlah 24 paguyuban. Hal ini mengindikasikan bahwa, keadaan penduduk Bali telah berkembang menjadi masyarakat yang pluralistik dan multikulturalistik. Pertanyaan yang muncul “bagaimana untuk

mengantisipasi berbagai gejolak atau paling tidak penyimpangan sosial dari masyarakat yang pluralistik?”

II. Pembahasan

Dalam kapasitasnya sebagai daerah kunjungan wisata (*tourist destination*), Bali dianggap sangat menjanjikan dari sudut ekonomi. Oleh karena itu, mobilitas penduduk (migrasi) akan terus berlangsung ke Bali. Fakta selama ini menunjukkan banyak “kaum pendatang” (luar Bali) yang sengaja datang ke Bali dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan, baik sebagai pedagang, bisnis, mencari lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Maraknya para pendatang sangat terasa bersamaan dengan datangnya hari-hari besar keagamaan, seperti; Natal, Idul Fitri, dan Tahun Baru. Ada kebiasaan “mudik” atau pulang kampung yang sudah mentradisi bagi tiap pemeluk agama pada hari-hari besar tersebut. Mereka (para migran) bertemu keluarga dan membawa pulang hasil kerja mereka selama di rantau. Dalam hal ini ada kebiasaan yang menyertainya ketika mereka dari kampung daerah asal, kembali ke perantauan setelah usai merayakan hari Raya tersebut, tidak jarang juga mereka membawa sanak famili yang ada di daerah asalnya, terutama yang masih mencari lapangan kerja (pengangguran).

Tidak dapat dipungkiri, masalah kependudukan merupakan salah satu isu yang cukup krusial dan menjadi kekhawatiran yang serius di Bali dewasa ini. Bali yang dari segi lahan hanya mempunyai daya dukung 3.553.195 orang, sekarang sudah mencapai 3.023.726 orang. Ada kekhawatiran Bali akan tenggelam kalau masalah kependudukan tidak terkendalikan (Pitana, *Bali Post*, 4-1-2001). Untuk masalah kependudukan, terutama menjamurnya kaum pendatang, Bali telah memasuki tahap siaga satu (Kusumawardhana, *Bali Post*, 4-4-2001).

Sesuai dengan fakta hasil berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1986 dimana migrasi risen netto Propinsi Bali kurang lebih 16.000 orang (Mariyah, 2004). Ini berarti jumlah migran yang masuk ke Propinsi Bali lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk Bali yang keluar menuju daerah-daerah lain di Indonesia. Akan tetapi mulai tahun 1990 migran netto Propinsi Bali berubah menjadi positif mencapai 40.000 orang (*ibid*). Pada tahun 2002 penduduk pulau Bali berjumlah 3.2 juta orang, termasuk dari 21 paguyuban etnis nusantara dan pekerja asing dari berbagai negara (Geriya, 2004).

Menjamurnya jumlah “kaum pendatang” yang datang ke Bali, paling tidak dapat dilihat dari jumlah paguyuban etnis Nusantara yang ada di Bali. Menurut data dari Badan Informasi dan Telematika Propinsi Daerah Bali, tahun 2004 ada 22 jumlah paguyuban etnis Nusantara, yaitu:

1. Ikatan keluarga Batak (Sumatra Utara)
2. Ikatan Keluarga Minang Saiyo Minang Kabau (Sumatra Barat)
3. Paguyuban Mangle (Jawa Barat)
4. Paguyuban Banyumasan (Jawa Tengah)
5. Ikatan Keluarga Surakarta Hadiningrat (Jawa Tengah)
6. Paguyuban Kesuma/Eks Karesidena Surakarta (Jawa Tengah)
7. Paguyuban Ngeksigondo (Jogjakarta)
8. Ikatan Keluarga Besar Flambomora (NTT)
9. Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua (IMMAPA)
10. Ikatan Keluarga Maluku Bali “IKEMAL”
11. RKSS Kodya Denpasar Makasar Bugis

12. Ikatan Keluarga Toraja (IKAT)
13. Ikatan Keluarga Sangihe Talaud (IKSAT)
14. Ikatan Keluarga Maesa (Minahasa)
15. Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa (PSMTI)
16. Ikatan Keluarga Ombay Alor (NTT)
17. Paguyuban Klong-Bring Alor (NTT)
18. Persaudaraan Warga Tegal (Jawa Tengah)
19. Ketua Forum KKB
20. Kerukunan Keluarga Madura
21. Paguyuban Keluarga Sidoarjo (Jawa Tmur), dan tahun 2004 ditambah
22. Lembaga Adat Kebudayaan Aceh (Laka)

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, Bali telah berkembang menjadi sebuah daerah yang pluralistik dan multikultural. Dalam bahasa lain dapat dikatakan, keadaan masyarakat Bali dewasa ini dapat digolongkan kedalam masyarakat majemuk. Ciri utama masyarakat majemuk (*plural society*) adalah kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam satu unit politik. Masyarakat majemuk tersebut biasanya terpisah-pisah dalam pengelompokan yang didasarkan pada; ras, etnis, ekonomi dan agama (Furnival dalam Pelly, 1993:1).

Ada sebuah dalil yang tak terbantahkan, bahwa migrasi (perpindahan penduduk) selalu banyak membawa konsekuensi yang lebih banyak negatifnya. Migrasi akan menyebabkan terjadinya persaingan didalam perebutan lapangan kerja, dan tidak ketertampungan dalam lapangan kerja akan mendorong terjadinya berbagai penyimpangan sosial (*social pathology*). Sudah menjadi anak kandung bahwa migran selalu membawa “anak kandung” yang bernama kriminal atau berbagai bentuk dunia gelap (*black activities*) lainnya. Masalahnya akan menjadi besar manakala migrasi terjadi antar wilayah dengan etnik atau tatanan kultur yang berbeda. Dengan sendirinya akan terjadi ketegangan etnik (*ethnic tension*) yang dapat mengarah pada konflik terbuka. Kalau populasi migrasi begitu besar, sehingga mengganggu dominasi etnik lokal, maka budaya lokalpun akan kehilangan identitasnya, atau paling tidak akan kehilangan warna (Pitana, Bali Post, 4-1-2001)

Terlepas dari efek negatif sebagaimana dikemukakan Pitana di atas, keberadaan “kaum pendatang” (migran) di Bali sesungguhnya bisa dilihat pada posisi positif. Keanekaragaman budaya “pendatang” (migran) secara tidak langsung akan ikut memberi warna terhadap identitas kebudayaan Bali. “Kaum pendatang” (migran) dengan keanekaragaman budayanya merupakan “tambang emas” yang selama ini belum terjamah secara maksimal. Tidak bisa dihindari, para “kaum pendatang” (migran) akan membawa kebudayaannya ke Bali. Peristiwa-peristiwa budaya yang terjadi di daerah asal “kaum pendatang” (migran) akan bisa dielaborasi dengan berbagai peristiwa budaya yang terjadi di Bali, terutama di dalam Seni Pertunjukannya.

Kontak masyarakat Bali dengan budaya luar bukan sesuatu hal baru, karena telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai ‘pengaruh luar’ dalam adat budaya Bali, seperti pengaruh India, Cina, Arab dan – tentu saja – Jawa (MPLA, 1991; Mantra, 1993; Barth, 1993, dalam Pitana, 1994:156-157). Selanjutnya intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayaan luar meningkat secara dramatik pada paruh kedua abad ini, yang terkait erat dengan adanya perkembangan teknologi

yang pesat dibidang komunikasi dan transportasi, serta keberhasilan Bali menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang terkenal di dunia (*ibid*).

Dari prespektif sejarah, kebudayaan Bali memiliki keterbukaan dengan kebudayaan luar dan memperlihatkan sifat fleksibel dan adaptif. Potensi ini penting artinya untuk menghindari perbenturan antar budaya. Jika dilihat dari tatanan sejarah nasionalisme Indonesia, juga dapat dipahami bahwa konsep wawasan kebangsaan adalah “persatuan dan kesatuan”. Seperti dari pernyataan Presiden Soeharto, pada Dharma Santi Penyepian 1997, dalam Dewa Atmaja (2002), “bahwa dari kenyataan keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat dan budaya di Indonesia yang penting bukan masing-masing suku, bahasa, atau budayanya, akan tetapi keseluruhan suku bangsa, adat-istiadat, budaya, dan bahasanya. Jadi itulah hakekat dari wawasan kebangsaan “Persatuan dan kesatuan”.

III. Penutup

Dalam suatu masyarakat bangsa yang pluralistik atau majemuk merupakan suatu keharusan dalam menjaga keutuhan negara-bangsa (*nation state*) Indonesia. Secara konstitusional kita memiliki landasan yang kuat bagi integrasi nasional yaitu Ideologi Pancasila. Manusia juga merupakan faktor strategis, yaitu kajian difokuskan pada esensi manusia Indonesia memahami paham kebangsaan dalam zaman yang berubah cepat. Dalam kajian antropologi dan sosiologi, maka dapat digambarkan sisi yang menonjol pada manusia Indonesia adalah keterkaitannya yang kuat dengan kesatuan masyarakatnya (Atmadja, 2004). Sehubungan dengan hal itu maka perlu dipahami bahwa kuatnya kebersamaan dalam persamaan kebangsaan tumbuh karena (1) persamaan nasib pada masa lampau, (2) persamaan kepentingan masa kini, (3) persamaan aspirasi kemasa yang akan datang. Hasrat yang kuat akan kebersamaan kini memerlukan perawatan yang sekasama.

Dalam membina budaya pulralistik di tanah air (Bandem, 1995), mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kebijaksanaan dan arah perkembangan kebudayaan nasional. Salah satu faktor tersebut adalah: (1) semakin intensifnya interaksi sosial budaya antara sesama warga negara Indonesia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam. Dimana tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan adalah diarahkan untuk memberi wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa.

Daftar Bacaan

As, Sumajati, (ed), 2001

Manusia Dan Dinamika Budaya: Dari Kekerasan Sampai Baratayuda.
Yogyakarta: Fak. Sastra UGM dengan BIGRAF Publishing.

Bandem, I Made, 2003

“Pembangunan Bangsa Dari Prespektif Manajemen Kebudayaan”
(disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Diesnatalis xxxvi dan Wisuda xv).
STSI Denpasar.

Feng, Tian, 1999

Pencarian Makna Perubahan: Kajian Awal Tentang Modernitas dan Tradisi, dan Kebangkitan Budaya Pluralistik. (pada Keragaman dan Silang Budaya.dalam Jurnal SPI Th. Ix-1998/1999). Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.

Furnival dalam Pelly, 1993

“ Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk” dalam *Analisis CSIS (Central For Strategis and Internasional Studies)* Th. XXII. No. 3 Mei- Juni 1993

Geriya, I Wayan, 2004

Visi dan Strategi Kebudayaan Bali ke Depan dan Penjabaran ke Dalam Misi dan Tujuan PKB. (dalam MUDRA: Jurnal Seni Budaya Vol.14 No. 1 Januari 2004). ISI Denpasar.

-----, 1996

Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan lokal, Nasional, Global. Denpasar: Upada Sastra

Koentjaraningrat, 2004

Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia. Cet. Ke 20. Jakarta: Djambatan.

Lauer, Hobert H, 2003

Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mariyah, Emiliana, dkk. 2004

“Studi Kasus Misi Budaya Migran pada Kantong Kumuh di Desa Panjer Denpasar Selatan” (Suatu misi untuk mengantisipasi konflik) dalam *Jurnal Kajian Budaya.* Vol 1. No. 2 Juli 2004. Denpasar: UNUD

Oka, Ida Bagus, 1993

“Pembangunan Bali yang Berwawasan Budaya” dalam *Mudra*, Jurnal Seni Budaya. Edisi Khusus. Denpasar: STSI

Pitana, I Gede dan Putu G Gayatri, 2005

Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

-----, 1999

“Internasionalisasi dan Tradisionalisasi Pariwisata dan dinamika Sosial Budaya Masyarakat Bali”. *Makalah*, disampaikan pada Martikulasi Program Magister (S-2) Kajian Budaya Universitas Udayana tgl 20 Juli 1999

Soedarsono, R.M, 1999

Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.